**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN CIREBON PADA
PERLINDUNGAN KONSUMEN
FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING**

***THE ROLE OF THE CIREBON FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY IN THE PROTECTION OF
FINANCIAL CONSUMERS OF LENDING TECHNOLOGY***

Syaeful Bakhri
Institut Agama Islam Negeri Cirebon
sultan01aulia@yahoo.com

Layaman
Institut Agama Islam Negeri Cirebon
layaman72@gmail.com

Muh Iqbal Alfian
Institut Agama Islam Negeri Cirebon
iqbalalfan252@gmail.com

Abstract

The Financial Services Authority (itself is an institution that is independent and free from interference from other parties, which has the functions, duties and authority of regulation, supervision, inspection and investigation. Consumers themselves are one of the unimportant in running their business. From the government, they act really how to support customers with challenges faced by consumers, in terms of consumer financial services protection, the Financial Services Authority (OJK) and the government's extension of the peer to peer lending. The method used in this research is qualitative by using normative juridical. Data collection techniques were carried out using the triangulation method with observation, interviews and documentation. The efforts of the financial authorities related to consumer protection are already good with SATGAS Investment Alert, fintech emergency numbers, but it is still has not been maximized and needs to be increased again. The community itself still believes that applications with four or more stars and good reviews are official applications.

Keywords: *Financial Services Authority; Financial Technology; Consumer Protection.*

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Konsumen merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan roda suatu bisnis maka dari itu pemerintah pun menyadari betul bagaimana pentingnya peran konsumen dengan upaya melindungi para konsumen dalam hal perlindungan OJK perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang fintech khususnya pada peer to peer lending. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan menggunakan metode triangulasi yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Upaya OJK dalam melindungi konsumen dengan membentuk SATGAS Waspada Investasi, nomor darurat fintech, namun upaya tersebut belum

maksimal . Masyarakat masih beranggapan bahwasannya aplikasi yang berbintang empat atau lebih dan ulasannya bagus merupakan aplikasi yang resmi.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Financial Teknologi; Perlindungan Konsumen.

A. Pendahuluan

Teknologi semakin tahun semakin canggih, pengguna *smartphone* dan internet di Indonesia pun terus meningkat setiap tahunnya. Dari hasil survei yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017 dalam (APJII 2017), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa. Jadi jumlah pengguna internet pada tahun 2017 tersebut mencakup 54,68 persen dari total populasi Indonesia yang mencapai 262 juta orang. Semua sektor bisnis merambah kepada era digital ini, mulai dari perdagangan yang sekarang dikenal dengan *e-commerce* begitupun pula sektor keuangan yang sekarang ini di sebut dengan *financial technology* (*fintech*).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan badan independen pemerintah yang mengawasi sektor keuangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Salah satu tugas OJK dalam *financial technology* ini yaitu mengawasi sektor keuangan *crowd funding peer to peer lending* karena wewenang lembaga keuangan *digital payment* ada pada Bank Indonesia (Rahmayani 2018).

Konsumen merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan roda suatu bisnis, maka dari itu pemerintah menyadari betul bagaimana pentingnya peran konsumen dengan upaya melindungi para konsumen sehingga mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan konsumen dan tercantum pada Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pemerintah Pusat 2000). Dalam hal perlindungan konsumen jasa keuangan berdasarkan (Otoritas Jasa Keuangan 2013) pada bagian penjelasan umum dijelaskan bahwa Pasal 4 Undang-undang OJK menyebutkan: “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam sektor jasa keuangan bidang *financial technology (fintech)* khususnya pada *financial technology peer to peer lending*. Oleh karenanya, OJK memiliki kebijakan tersendiri dalam perlindungan konsumen yaitu melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/P.OJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Namun begitu, sebagaimana hasil penelitian Solikhah, Anisah, and Pradana (2020), peraturan tersebut rupanya belum cukup mampu meningkatkan *public awareness*. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya kasus kejahatan online seperti pembobolan, penyadapan dan *cybercrime* dalam pelaksanaan bisnis *fintech* (Benuf, Mahmudah, and Priyono, 2019). Berdasarkan data OJK tahun 2019, sejak awal tahun 2018 hingga september 2019 sudah menemukan adanya 1350 entitas *fintech* ilegal yang terblokir oleh Satuan Waspada Investigasi yang dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Selain itu, salah satunya kasusnya adalah sebagaimana yang dikabarkan dalam penelitian Priyo (2019) tentang adanya laporan tindakan pelanggaran korban konsumen *fintech peer to peer lending* dari perusahaan PT. VCard Technology Indonesia (*Vloan*) berupa pengancaman jaminan kerahasiaan data pribadi konsumen oleh para *debt collector* terkait. Padahal OJK sudah menegaskan dalam peraturannya pada Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 Pasal 39 bahwa untuk pelaku usaha jasa keuangan tidak boleh menagih menggunakan kata- kata kasar, mengancam, serta memberikan informasi, serta data kepada pihak ketiga.

Penelitian tentang OJK mengenai perlindungan konsumen *fintech* bukanlah suatu yang baru. Meskipun demikian, nampaknya belum ditemukan penelitian yang secara spesifik dikaji dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai langsung berbagai narasumber diantaranya korban perlindungan konsumen *fintech* itu sendiri.

Beberapa karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan yang dikaji, yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani (2018). Penelitian ini hanya fokus pada studi pustaka atau data sekunder belakang tanpa turun kelapangan untuk mencari fakta kebenarannya. Menurutnya regulasi yang mengatur perusahaan berbasis *financial technology* ini masih sangat sedikit. OJK selaku otoritas pengawas, baru memiliki 1

(satu) buah regulasi pengawasan perusahaan *financial technology*, yaitu terkait pengawasan salah satu produk *financial technology* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sementara, ada begitu banyak perusahaan dan jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan berbasis *fintech* yang dapat diakses secara mudah oleh jutaan rakyat Indonesia saat ini.

Dan kedua, penelitian yang dilakukan oleh Samsul (2016) tentang “Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”. Dalam penelitian ini muncul permasalahan pokok, yaitu menurutnya OJK belum secara tegas memperkuat peran OJK dalam penyelesaian sengketa, sebab masih berperan sebagai fasilitator atau mediator yang dinilai lebih sempit dari yang diamanatkan oleh Undang-undang OJK. Selain itu, hasil penelitiannya juga menyebutkan bahwa terdapat materi dalam UU OJK yang belum dirumuskan dalam Peraturan OJK yaitu mengenai pembelaan hukum terhadap konsumen oleh OJK. Dan seharusnya perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh OJK haruslah sejalan dengan mekanisme perlindungan konsumen yang tertuang dalam UU PK atau OJK menjadi lembaga utama perlindungan konsumen untuk jasa keuangan.

Dari kedua topik penelitian yang telah dipaparkan di atas, belum ada tinjauan secara khusus dan komprehensif tentang perlindungan konsumen *financial technology lending* yang secara spesifik dikaji melalui penelitian lapangan (*field research*) ini, selain nantinya akan tergambar karakteristik sesungguhnya mengenai pengawasan OJK dalam perlindungan konsumen, penelitian ini juga mencoba menggambarkan kinerja pengawasan yang telah dilakukan OJK dalam perlindungan konsumen *financial technology lending* ini. Disinilah letak perbedaan studi ini dengan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai 1) Bagaimana peran OJK dalam mengawasi lembaga *financial technology lending* pemberi pinjaman online? 2) Bagaimana upaya OJK dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen *financial technology lending*?

B. Kerangka Teori

1. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan, setiap pihak dilarang ikut campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin terselenggaranya peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal. OJK harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan (Sutedi, 2014).

Pasal 4 UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan menurut Sutedi, (2014) adalah sebagai berikut:
(1) Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas keuangan,
(2) Menjaga stabilitas sistem keuangan, (3) Melakukan pengawasan non bank dalam struktur yang sama seperti sekarang, (4) Pengawasan keluar dari otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang dipegang oleh lembaga baru.

Sebagaimana pada Pasal 6 UU No.21 Tahun 2011 tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan juga pengawasan terhadap kegiatan pada beberapa sektor atau beberapa lembaga diantaranya: (1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, (2) Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, (3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya (Hermansyah, 2017).

2. Perlindungan Jasa Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Menurut Undang-undang No 2 1999 Tentang Perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen (Kusumastuti, 2015) .

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Djakfar (2009), konsumen didefinisikan sebagai “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha jasa keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan serta perusahaan *financial technology*, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan berdasarkan penjelasan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yaitu untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Kusumastuti (2015) juga menegaskan bahwa hubungan yang ideal antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan yang koordinat (seimbang) dalam setiap tindakan atau transaksi yang dilakukan. Meskipun dalam realita di lapangan, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berada pada hubungan yang subordinat (tidak seimbang) pelaku usaha memiliki posisi tawar yang lebih kuat dari konsumen.

3. *Financial Technology Lending*

Fintech merupakan singkatan dari kata *financial technology* yang diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *financial technology* diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan (Napitupulu et al, 2017).

Sementara menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19//12/PBI/2017 teknologi finansial atau *financial technology (fintech)* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, dan/atau mode bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2017).

Menurut Santi, Budiharto, dan Saptono (2017) pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang tentu saja melibatkan beberapa pihak. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diantaranya:

1. Penyelenggara, Menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang *online* ini sebagai lembaga jasa keuangan lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi.
2. Pemberi Pinjaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
3. Penerima Pinjaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ketentuan penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang

perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat-syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

4. Jenis – Jenis *Financial Technology*

Terdapat enam jenis-jenis *financial technology* yang dikemukakan oleh (Basuki and Husein 2018) yaitu:

1. *Management asset, platform expense management system* membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya *start up* seperti halnya cicil, kudo dan lainnya, maka masyarakat Indonesia bisa lebih *paperless* karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.
2. *Crowdfunding* yaitu kegiatan penggalangan dana beramal, dan kegiatan sosial lainnya sekarang sudah bisa melalui *startup* yang bergerak yang bergerak di bidang *crowdfunding*, lebih tepatnya *crowdfunding* adalah *startup* yang menyediakan *platform* penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya.
3. *E-money* merupakan uang elektronik layanan elektronik untuk menyimpan data instrument pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.
4. *Insurance* jenis *startup* yang bergerak dibidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, dimana mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut dimasa mendatang, jenis asuransi *startup* tidak semua berjalan demikian. Adapula *startup* asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunaanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter, rumah sakit, dan sebagainya.
5. *Lending peer to peer (P2P)*, adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung

melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet, *peer to peer lending* ini juga merupakan salah satu jenis *crowdfunding*. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini bisa menggunakan jasa *startup* yang bergerak di bidang *peer to peer lending*.

6. *Payment Gateway*, layanan elektronik yang memungkinkan masyarakat untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *proprietary channel*, *payment gateway* satu diantaranya iPaymu.

Sementara menurut Bank Indonesia sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19//12/PBI/2017 pasal 3 ayat 1, ada 5 macam *financial technology*, diantaranya sebagai berikut: (1) Sistem Pembayaran, (2) Pendukung Pasar; (3) Manajemen Investasi dan Manajemen Risiko (4) Pinjaman, Pembiayaan dan Penyediaan Modal (*peer o peer lending*), (5) Jasa Finansial Lainnya.

5. *Financial Technology – Peer to peer (P2P) Lending*

Fintech menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang dapat menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan /atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. *Financial Technology* sendiri diawasi khusus oleh satuan tugas yang dibentuk khusus oleh OJK yang bernama Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi ini adalah satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Sementara itu, *peer to peer lending* dalam POJK Nomor 77/POJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Salah satu industri dari layanan *fintech* ini juga tengah mengalami pertumbuhan pesat

termasuk juga di Indonesia, sehingga beresiko terjadinya kemungkinan negatif dalam hal penegakan hukum perlindungan konsumen atas kejahatan dalam penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* yang tak berizin (Miru dan Yodo 2004).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam OJK bahwasanya penyelenggara *fintech lending* harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya. Maksimal 1 (satu) tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar, Penyelenggara wajib mengajukan permohonan perizinan ke OJK. Dalam pelaksanaannya keduanya dapat dibedakan dengan cara menelaah apakah penyelenggara dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara intensif latar belakang keadaan dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan (Indiantoro and Supomo, 2002). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan teori-teori dan konsep yang mendukung dan berkaitan dengan studi lapangan. Masa penelitian dilakukan pada tiga triwulan, yaitu pada dua triwulan akhir tahun 2019 dan satu triwulan di awal tahun 2020.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Meleong, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah perlindungan konsumen *financial technology lending*, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan informan diantaranya OJK, konsumen sekaligus korban *fintech*, dan masyarakat umum. Adapun data sekunder yang digunakan di sini yaitu, skripsi, jurnal, dan website yang berkaitan dengan pengawasan OJK pada perlindungan konsumen *financial technology lending*, serta data dari OJK dan para konsumen.

Teknik pengumpulan data yang digunakan triangulasi dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pertama, dilihat dari segi proses pengumpulan data, observasi menurut Sugiyono (2012) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi berperan serta dan observasi tidak berperan serta. Kedua, wawancara dijelaskan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (Aswani and Masyhuri, 2011). Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa informan yang terlibat dalam pinjam meminjam *financial technology lending* seperti Otoritas jasa keuangan dan konsumen. Ketiga, dokumentasi mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Maksud dari dokumentasi ini peneliti mencari sumber-sumber data yang lain selain wawancara dan observasi yang berkaitan dengan kajian yang dibahas. Seperti misalnya buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang relevan (Arikunto, 2014).

D. Hasil Penelitian Dan Diskusi

1. Peran OJK Dalam Mengawasi Lembaga *Financial Technology Lending* Pemberi Pinjaman Online

Mengenai aturan pengawasan perusahaan *financial technology lending* dalam layanan pinjam meminjam OJK mempunyai peraturan tersendiri yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016. OJK dalam melakukan pengawasan terhadap *financial technology lending* atau pinjam meminjam uang online dibagi menjadi dua tahapan : pra-operasional usaha, saat operasional usaha (Santi et al., 2017).

Pra Operasional Usaha, tahapan ini adalah saat penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi informasi saat akan mulai beroperasi, tahap pra-operasional usaha berupa pengurusan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara saat kegiatan usaha akan mulai beroperasi. Secara teknis tahap pra-operasioal berupa pengurusan pendaftaran dan izin penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini adalah badan hukum baik yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Bagi penyeleggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum indonesia atau badan hukum asing. Khusus untuk penyelenggara warga negara

asing atau badan hukum asing, kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (Santi et al. 2017).

Penyelenggara kegiatan usaha ini dalam melakukan kegiatannya terlebih dahulu wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sebelum mengajukan perizinan, terlebih dahulu harus mengajukan pendaftaran kepada OJK. Pengajuan permohonan pendaftaran ini paling lambat diajukan 6 (enam) bulan setelah POJK Nomor 77/POJK.01/2016 berlaku. Permohonan pendaftaran tersebut diajukan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan formulir disertai dengan lampiran dokumen seperti yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) POJK di atas. OJK kemudian akan menelaah permohonan pendaftaran yang diajukan penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi informasi kemudian menetapkan persetujuan atas permohonan pendaftaran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja tersebut kemudian OJK akan menetapkan persetujuan pendaftaran dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.

Santi et al. (2017) menambahkan bahwa setiap penyelenggara yang telah terdaftar di OJK kemudian wajib untuk mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang diberikan oleh OJK tersebut, penyelenggara yang telah mendapat surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan, maka surat tanda bukti terdaftar sebagai penyelenggara menjadi batal dan penyelenggara tersebut tidak lagi terdaftar di OJK dan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran kembali kepada OJK.

Syarat-syarat pengajuan permohonan perizinan diatur di dalam Pasal 11 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan OJK akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan. Selama 20 (dua puluh) hari tersebut, OJK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen dan analisis kelayakan atas rencana kerja.

Dalam proses memberikan izin, OJK untuk melakukan wawancara terhadap pemilik dan/atau calon direksi dan verifikasi langsung ke kantor pemohonan izin. Pelaksanaan wawancara tersebut sebagai sarana *fit and proper test* terhadap calon direksi/komisaris penyelenggara. Wawancara juga mendapatkan informasi tentang setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau kegiatan pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya, tidak tercatat dalam daftar kredit macet, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di dalam pengawasan tahap pra-operasional ini diatur mengenai pengawasan OJK terhadap perubahan kepemilikan penyelenggara yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. Selain itu, apabila penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan pencabutan izin atas permohonan sendiri kepada OJK dengan disertai alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban penggunaan. Pencabutan izin tersebut paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan pencabutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Adapun saat operasional usaha, menurut Santi et al (2017), kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi baru dapat dimulai ketika telah mendapat izin dari OJK. Terdapat dua macam tipe pengawasan yang dilakukan oleh OJK saat operasional usaha yaitu pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*self assessment system*) dan pemeriksaan oleh OJK (*officer supervisory system*).

Tipe pengawasan pertama yaitu *self assessment system*, yaitu berupa pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara yang diatur di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan melalui laporan berkala.

Pada tahap operasional usaha ini dimungkinkan ada penyelenggara yang sudah memulai kegiatan usahanya terdaftar di OJK tetapi belum mengajukan izin penyelenggaraan kepada OJK. Meskipun demikian, OJK tetap melakukan pengawasan

dengan tipe *self assessment system* yakni laporan berkala. Penyampaian laporan berkala pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Pasal 9 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 maret, 30 juni, 30 september, dan 31 desember. Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan disampaikan pada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan. Laporan berkala ini berjangka waktu 1 (satu) tahun hingga batas pengajuan izin penyelenggaraan berakhir.

Bagi penyelenggara yang telah memperoleh izin penyelenggaraan, wajib untuk menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan seperti yang diatur di dalam Pasal 45 hingga Pasal 56 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Laporan bulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya. Sementara laporan tahunan disampaikan kepada OJK untuk periode pelaporan 1 januari sampai 31 desember. Laporan tahunan tersebut terdiri dari laporan keuangan dan laporan kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Laporan tahunan yang disampaikan kepada OJK berbentuk fisik dan dokumen elektronik. Jangka waktu penyampaian laporan tersebut paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.

Tipe pengawasan yang kedua adalah *officer supervisory system*, yakni pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh OJK. Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh OJK untuk mengumpulkan, mencari, mengolah, mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. OJK akan melakukan pengawasan secara berkala yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan berkala yang disampaikan oleh penyelenggara sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Selain pengawasan laporan berkala, OJK juga melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan berkala serta menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan (2016) juga menyebutkan bahwa pemeriksaan OJK dilakukan setiap satu bulan sekali untuk memeriksa laporan bulanan yang disampaikan oleh penyelenggara bertujuan untuk melihat kebenaran aspek substansi laporan berkala dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan jika diperlukan OJK dapat meminta informasi tambahan dan/atau data tambahan kepada penyelenggara. Sama halnya dengan pemeriksaan terhadap laporan tahunan, dimana OJK dapat meminta

informasi tambahan dan/atau data tambahan kepada penyelenggara. Selain pemeriksaan berkala, OJK juga dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan insidental. Pemeriksaan insidental dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil penelitian atas keterangan yang di dapat OJK dari surat pengaduan patut diuga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha menyimpang salah satunya tidak memenuhi hak nasabah. Pelaksanaan pemeriksaan insidental ini juga dapat berupa pemeriksaan terhadap rekam jejak audit guna keperluan pengawasan, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya.

Bentuk pengawasan lain yang dilakukan oleh OJK adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dengan mengatur beberapa ketentuan larangan di dalam Pasal 43 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sementara dari sisi metode Otoritas Jasa Keuangan, dalam saat ini melakukan pengawasan terhadap penyelenggara *financial technology lending* berdasarkan OJK (2017) yaitu dilakukan melalui 3 (tiga) metode, antara lain: (1) *Offsite*, melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK dan juga rencana implementasi *host-to-host* dengan server Perusahaan dengan memanfaatkan struktur elemen database sebagaimana dimaksud dalam Formulir 3C POJK 77/2016, (2) *Market Conduct* (Semi SRO), pada penjelasan POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah dijelaskan definisi market conduct, yaitu perilaku lembaga jasa keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.

Berdasarkan ketentuan POJK No.1/POJK.07/2013, pengawasan *market conduct* dilakukan dengan tujuan: (a) Memastikan terciptanya budaya dan perilaku lembaga jasa keuangan berorientasi pada konsumen untuk memberikan kedudukan yang seimbang dalam berinteraksi antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen, (b) Memahami perilaku pasar pada sektor jasa keuangan dan individual lembaga jasa keuangan guna mengidentifikasi adanya potensi kerawanan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan masyarakat serta upaya memitigasi risiko, (c) Melindungi kepentingan konsumen melalui kegiatan pengawasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan prudential. Sesuai ketentuan Pasal 48, seluruh penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. OJK telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada tanggal 17 januari 2019.

AFPI memiliki *code of conduct* dan memberikan beberapa pengaturan yang belum diatur OJK, diantaranya batas maksimal bunga dan tata cara penagihan, (d) *Onsite*, melalui mekanisme pemeriksaan langsung baik yang dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

2. Upaya OJK Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen *Financial Technology Lending*

Bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen OJK RI (2017) dijelaskan bahwa OJK telah melakukan pemetaan aspek perlindungan konsumen terhadap usaha-usaha *financial technology* yang berkembang di Indonesia, baik yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan yang regulated (seperti bank dan perusahaan asuransi) maupun usaha *financial technology* yang dilakukan oleh perusahaan *startup* atau perusahaan yang baru merintis. Pemetaan tersebut memperhatikan data yang berasal dari Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan (PIDEK) OJK dan Asosiasi Fintech Indonesia. Dari hasil pemetaan tersebut, terdapat beberapa potensi kerawanan dan risiko yang patut menjadi perhatian oleh regulator terkait *financial technology* yaitu kegagalan sistem, kesalahan informasi, kesalahan transaksi, keamanan data (*cybersecurity*), penerapan prinsip Know Your Client (KYC), Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), potensi gagal bayar, tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi, klausula eksonerasi (pengecualian tanggung jawab dalam perjanjian), dan penanganan pengaduan konsumen.

Memperhatikan hal tersebut, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kedepan, OJK harus lebih memperhatikan perkembangan *financial technology* dan melakukan hal-hal yang diperlukan sesuai kewenangannya untuk memastikan terciptanya *financial technology* yang memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan masyarakat. *Financial technology* yang dilaksanakan oleh lembaga jasa keuangan wajib mengimplementasikan regulasi yang terkait dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terdapat pembahasan Edukasi Dan Perlindungan Konsumen *Financial Technology* pada BAB VII, pada Pasal 29 sampai

Pasal 40 dijelaskan semua kewajiban penyelenggara *financial technology lending* yang harus ditaati sesuai aturan POJK yang OJK buat.

Dalam melaksanakan amanat perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menerapkan 5 (lima) prinsip perlindungan konsumen. Agar kelima prinsip perlindungan konsumen tersebut terwujud dalam setiap kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia, maka OJK menyusun strategi perlindungan konsumen keuangan. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya OJK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf (c) UU OJK bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kelima strategi perlindungan konsumen tersebut diantaranya (Bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen OJK RI, 2017) : (1) Insfratuktur, (2) Regulasi, (3) Market conduct, (4) Edukasi Dan Komunikasi.

Dengan beberapa kerawanan tersebut OJK melakukan *treatment* dengan melakukan beberapa pencegahan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan dalam pasal tersebut diantaranya: (1) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya, (2) Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan (3) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK Cirebon juga melakukan tindakan preventif mengenai edukasi dan perlindungan konsumen diantaranya mengedukasi masyarakat lewat media sosial seperti instgram, media siaran radio dan juga media-media cetak yang ada di wilayah 3 (tiga) Cirebon. Selain melalui media sosial dan media cetak, OJK Cirebon mengedukasi lewat instansi-instansi pendidikan, dengan mengadakan seminar di kampus-kampus yang ada di wilayah 3 (tiga) Cirebon. Disamping itu OJK Cirebon juga membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan dengan langsung melapor ke kantor OJK Cirebon untuk melakukan konsultasi maupun pengaduan.

Terkait dengan *financial technology* ilegal yang ada dimasyarakat, pada hakikatnya OJK hanya mengawasi *financial technology* yang resmi yang berjumlah 140 tersebut, akan tetapi OJK pun tetap melakukan tindakan bagi *financial technology* ilegal dengan membentuk SATGAS Waspada Investasi (SWI). SATGAS Waspada Investasi ini adalah satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Khanief Abdul Jabbar selaku pengawas junior IKNB OJK Cirebon menjelaskan, bahwa dalam melakukan penindakan maupun pencegahan *financial technology ilegal* yang ada dimasyarakat, SATGAS Waspada Investasi tidak menindak sendiri, akan tetapi SATGAS Waspada Investasi ini merupakan hasil gabungan kerjasama 13 instansi/lembaga terkait, yang meliputi: Regulator: (1) Otoritas Jasa Keuangan, (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), (3) Bank Indonesia, (4) Kementerian Agama Republik Indonesia, (5) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, (6) Kementerian Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia, (7) Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, (8) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (9) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (10) Kementerian RISTEKDIKTI, (11) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), (12) Kejaksaan Republik Indonesia, (13) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait tugas SATGAS Waspada Investasi mengenai *financial technology lending* ilegal treatment atau penanganan yang dilakukan SATGAS Waspada Investasi ada yang berbeda dengan penanganan OJK sendiri, perbedaannya yaitu pada penanganan tindakan refresif pada ranah pidana, OJK tidak bisa menyentuh ranah pidana karena belum ada kewenangan pada ranah pidana tersebut, maka dari itu SATGAS Waspada Investasi bekerja sama dengan 13 instansi dan lembaga yang diantaranya terdiri dari penegak hukum dan regulator.

Berdasarkan hasil observasi pada Khanief Abdul Jabbar yang pengawas Junior IKNB OJK Cirebon. Terdapat 3 (tiga) strategi *treatment* yang dilakukan SATGAS Waspada Investasi secara umum yaitu tindakan preventif, tindakan kuratif, dan tindakan refresif: Pertama, tindakan preventif. Tindakan preventif yang dilakukan oleh SATGAS Waspada Investasi tidak jauh berbeda dengan tindakan preventif yang dilakukan oleh OJK karena masih sama mengacu pada Pasal 28 Undang-Undang No 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan memberikan informasi dan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya melalui media sosial, media cetak, dan lain-lain, pembukaan warung waspada investasi untuk penerimaan pengaduan konsultasi masyarakat dan koordinasi antar anggota Satgas Waspada Investasi. Nara sumber menegaskan, hal tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat serta mengidentifikasi dan mengevaluasi serta tindakan yang diperlukan terhadap tawaran-tawaran pembiayaan *financial technology lending* melalui berbagai sarana pemasaran tidak terbatas kepada penyampaian melalui internet.

Kedua tindakan kuratif, bekerjasama dengan OJK dalam penerbitan izin keramaian/penyelenggaraan kegiatan *financial technology lending* dan melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan *financial technology* yang merugikan masyarakat agar mendapat izin dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga tindakan represif, tindakan represif yang dilakukan Satgas Waspada Investasi yaitu dengan melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan, penutupan bagi *financial technology lending* yang belum memiliki izin/terdaftar resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, dan penutupan *financial technology lending* yang terindikasi ilegal. Terkait penindakan terhadap *financial technology lending* ilegal atau yang belum mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan SATGAS Waspada Investasi melakukan penindakan dengan menutup *financial technology lending* tersebut karena bisa membahayakan masyarakat umum.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya proses pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga *financial technology lending* terbagi menjadi 2 yaitu pra operasional usaha dan saat operasional usaha, pengawasan tersebut sudah baik akan tetapi harus lebih ditingkatkan dan diperketat lagi agar tidak terjadi *financial technology* yang resmi yang masih berperilaku sama dengan *financial technology* yang ilegal dan harus ada penertiban terkait logo OJK agar penggunaan logo OJK hanya diberikan dan dapat dipakai oleh aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar saja.

Upaya OJK dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen *financial technology lending* juga harus selalu ditingkatkan, seiring dengan pesatnya perkembangan informasi yang ada, pemberian edukasi terhadap masyarakat belum menjangkau semua elemen masyarakat terkait *financial technology*.

Dalam memberikan perlindungan data konsumen terhadap korban *financial technology lending* sudah baik diantaranya dengan membuat nomor darurat *fintech* dan membentuk Tim SATGAS Waspada Investasi dengan bekerjasama dengan 13 lembaga lainnya dengan membuat strategi treatment yang dilakukan yaitu dengan melakukan tindakan preventif, kuratif, refresif dan juga menutup *fintech-fintech* ilegal. Untuk perbaikan akan datang OJK sebaiknya memiliki peraturan secara khusus tentang maksimal bunga *fintech*, prosedur penagihan utang oleh pihak ketiga dan beberapa hal terkait teknis operasional, karena selama ini masih menggunakan peraturan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia).

Daftar Pustaka

- APJII. (2017). “Laporan Survei Internet.” *Survei Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*. Retrieved (<https://apjii.or.id/survei>).
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aswani, Nur, and Masyhuri. (2011). *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN Malik Press.
- Bank Indonesia. (2017). *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. Jakarta: LN.2017/NO 245; PERATURAN.GO.ID : 16 HLM.
- Basuki, Ferry Hendro, and Hartina Husein. (2018). “Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survei Pada Bank Di Kota Ambon).” *Jurnal Manis* 2(1):60–74.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.” *Jurnal Refleksi Hukum* 3(2):145–60.
- Bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen OJK RI. (2017). *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Djakfar, Muhammad. (2009). *Hukum Bisnis “Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah.”* Malang: UIN Malang Press.
- Hermansyah. (2017). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indiantoro, Nur, and Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFPE.
- Kusumastuti, Dora. (2015). “Kajian Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor i/p.Ojk.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Indonesia.” 8(1):1–10.
- Meleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Napitupulu, Sarwin Kiko, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah, and Aryanti Dwi Rachmawati. (2017). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2011). *Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). "Frequently Asked Questions." Retrieved (<https://www.ojk.go.id/id/FAQ.aspx>).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). "FAQ Fintech Lending." in *FAQ: Kategori Umum*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemerintah Pusat. (2000). *Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821, LL SETNEG : 35 HLM.
- Priyo, B. Sadono. (2019). "Kejahatan Fintech Makin Marak, Korban Dari Dipermalukan Hingga Dipecat Dari Pekerjaan." *SuaraKarya.Id*. Retrieved August 29, 2019 (<https://www.suarakarya.id/detail/84749/Kejahatan-Fintech-Makin-Marak-Korban-Dari-Dipermalukan-Hingga-Dipecat-Dari-Pekerjaan>).
- Rahmayani, Nuzul. (2018). "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 2(1):24–41.
- Samsul, Inosentius. (2016). "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 4(2):156.
- Santi, Emama, Budiharto, and Hendro Saptono. (2017). "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016)." *Dipenogoro Law Jurnal* 6(3):12.
- Solikhah, Rohmawati Fadilatu, Bintang Rahayu Anisah, and Rangga Aji Pradana. (2020). "Revitalisasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Tonggak Akselerasi Perlindungan Konsumen Dalam Fintech: Peer To Peer (P2P) Lending." *ULR: UIN LAW REVIEW* 1(1).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.